

**SISTEM POLITIK YANG PERNAH ADA DAN BERLAKU DI INDONESIA*****POLITICAL SYSTEMS THAT HAVE EXISTED AND APPLY IN INDONESIA***

**Olivia Rizka Vinanda<sup>1</sup>, M. Abdillah<sup>2</sup>, Naufal Hanif Jodian<sup>3</sup>, Rintan Ratna Dila<sup>4</sup>  
Tri Agustina<sup>5</sup>**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: [oliviary24@gmail.com](mailto:oliviary24@gmail.com)<sup>1</sup>, [ariskiapryansyah@gmail.com](mailto:ariskiapryansyah@gmail.com)<sup>2</sup>, [naufalhanifjolian@gmail.com](mailto:naufalhanifjolian@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ratnadila872@gmail.com](mailto:ratnadila872@gmail.com)<sup>4</sup>, [triagustinaa28@gmail.com](mailto:triagustinaa28@gmail.com)<sup>5</sup>

**Article Info****Article history :**

Received : 21-05-2025

Revised : 23-05-2025

Accepted : 25-05-2025

Pulished : 27-05-2025

**Abstract**

*Indonesia as a country with a long historical background has experienced various dynamics in its political system. Since independence in 1945, the Indonesian political system has undergone significant changes, both in terms of institutional structure, power mechanisms, and people's participation in government. At the beginning of independence, Indonesia adopted a parliamentary democracy system marked by many cabinet changes and government instability. Then, during the Old Order, the political system changed to a highly centralized guided democracy under the leadership of President Soekarno. After that, the New Order under President Soeharto implemented a political system known as Pancasila democracy, but in practice it was very authoritarian and militaristic. The 1998 reformation was an important milestone in changing the Indonesian political system towards a more open and participatory democracy. Each period of the political system has had a major influence on social, economic, and legal life in Indonesia. This journal will discuss in detail the characteristics of each political system that has ever applied in Indonesia, the factors causing the changes, and their impact on the order of national and state life. This study aims to provide a comprehensive historical and analytical understanding of the evolution of the Indonesian political system to become an important lesson for the development of a healthy democracy in the future.*

**Keywords:** *Political System, Parliamentary Democracy, Guided Democracy*

**Abstrak**

Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah panjang telah mengalami berbagai dinamika dalam sistem politiknya. Sejak kemerdekaan tahun 1945, sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi struktur kelembagaan, mekanisme kekuasaan, maupun partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan banyaknya pergantian kabinet dan ketidakstabilan pemerintahan. Kemudian, pada masa Orde Lama, sistem politik berubah menjadi demokrasi terpimpin yang sangat sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Setelah itu, masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menerapkan sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya sangat otoriter dan militeristik. Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem politik Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Setiap periode sistem politik tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Dalam jurnal ini akan dibahas secara rinci karakteristik dari masing-masing sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia, faktor penyebab perubahannya, serta dampaknya terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman historis dan analitis yang komprehensif mengenai evolusi sistem politik Indonesia agar menjadi pelajaran penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat di masa depan.

**Kata Kunci:** *Sistem Politik, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin*



## **PENDAHULUAN**

Sistem politik merupakan fondasi penting dalam pengelolaan sebuah negara. Ia mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat berpartisipasi, serta bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Di Indonesia, sistem politik mengalami berbagai fase dan perubahan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah bangsa. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak luas terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa sistem politik yang berbeda. Setiap sistem memiliki karakteristik, kelemahan, serta kelebihan masing-masing. Perubahan sistem politik umumnya terjadi akibat krisis kepercayaan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Selain itu, tekanan dari masyarakat dan perkembangan dunia internasional juga turut mendorong transformasi politik tersebut. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem ini memberikan peran besar kepada parlemen dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada lemahnya stabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mampu menjalankan program-program secara optimal. Kemudian, pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno mengganti sistem parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Sistem ini menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan, dengan peran parlemen yang semakin melemah. Demokrasi terpimpin dianggap sebagai solusi atas kekacauan politik sebelumnya, namun cenderung otoriter. Kebebasan berpendapat dan peran oposisi hampir tidak ada dalam sistem ini. Setelah runtuhnya Orde Lama, muncullah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sistem politik pada masa ini disebut sebagai demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya sangat sentralistik dan dikendalikan oleh militer. Pemerintah melakukan pembatasan terhadap partai politik dan kebebasan pers. Meskipun stabil secara politik, sistem ini mengabaikan hak-hak demokratis rakyat.

Krisis moneter dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru memicu gerakan reformasi tahun 1998. Mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut perubahan sistem politik menuju demokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel. Reformasi berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam tatanan politik Indonesia. Periode ini dikenal sebagai era Reformasi. Era Reformasi ditandai dengan penguatan institusi demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), dan desentralisasi pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam politik meningkat melalui pemilu yang lebih jujur dan adil. Namun, tantangan tetap ada, seperti korupsi politik, politik identitas, dan oligarki. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia masih dalam proses konsolidasi. Kajian terhadap sistem politik yang pernah ada di Indonesia penting untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan berkembang. Dengan mempelajari sejarah sistem politik, kita dapat mengambil pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan masa lalu. Hal ini menjadi bekal untuk membangun sistem politik yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Maka dari itu, tulisan ini hadir sebagai kontribusi akademik dalam memahami evolusi sistem politik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur, sebagaimana dijelaskan oleh Sarwono (2006), sering disebut juga sebagai penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber



seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar teori dalam membahas permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Demokrasi Parlementer (1945–1959)**

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem politik demokrasi parlementer. Sistem ini ditandai dengan peran dominan parlemen dalam menentukan arah kebijakan negara. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dapat dibubarkan kapan saja apabila kehilangan dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan pergantian kabinet yang sangat sering terjadi. Demokrasi parlementer dianggap sebagai sistem yang demokratis karena memberikan ruang besar kepada berbagai partai politik untuk terlibat dalam pemerintahan. Pemilu pertama tahun 1955 menjadi tonggak sejarah penting dalam demokrasi Indonesia. Dalam pemilu tersebut, rakyat memilih anggota parlemen secara langsung. Namun, hasil pemilu tidak mampu menciptakan stabilitas pemerintahan. Banyaknya partai yang terlibat justru memicu fragmentasi politik. Selama masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali dalam waktu singkat. Pergantian yang terlalu cepat ini menghambat jalannya pembangunan dan pengambilan keputusan strategis. Setiap pergantian kabinet membawa kebijakan baru yang tidak berkelanjutan. Situasi ini memperlihatkan lemahnya kohesi antarpartai dalam membangun koalisi yang stabil. Akibatnya, sistem ini dianggap tidak efektif dalam menghadirkan pemerintahan yang kuat.

Salah satu penyebab tidak stabilnya sistem parlementer adalah belum matangnya budaya politik dan kelembagaan partai. Banyak partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan nasional. Ideologi yang berbeda-beda antar partai juga menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan bersama. Ditambah lagi, kurangnya pengalaman dalam berdemokrasi membuat para elite politik kesulitan menjalankan sistem parlementer dengan baik. Faktor ini memperparah kondisi politik nasional saat itu. Selain masalah internal, kondisi sosial ekonomi yang masih lemah turut memperparah instabilitas politik. Rakyat Indonesia pada masa itu masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan. Pemerintah belum mampu merespons secara cepat dan tepat karena struktur pemerintahan yang tidak solid. Program-program pembangunan sering kali terganggu oleh konflik politik di pusat kekuasaan. Ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap elit politik. Situasi semakin memburuk dengan munculnya konflik ideologis antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Ketiga kelompok tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam membangun negara. Perdebatan mengenai dasar negara juga belum selesai, terutama terkait dengan ideologi Pancasila dan Islam. Ketegangan ideologis ini menimbulkan polarisasi yang semakin tajam. Hal ini turut menghambat lahirnya kebijakan yang bersifat inklusif dan menyeluruh. Presiden Soekarno yang awalnya hanya berperan sebagai kepala negara kemudian merasa perlu mengambil alih kendali pemerintahan. Ia menganggap bahwa sistem parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Soekarno mulai mengusulkan sistem demokrasi terpimpin sebagai alternatif. Dalam pidato-pidatonya, ia menyatakan bahwa demokrasi parlementer terlalu liberal dan tidak cocok bagi bangsa yang baru merdeka. Gagasan ini mendapat dukungan dari sebagian pihak yang lelah dengan kekacauan politik.



Puncaknya terjadi pada tahun 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan dekrit itu, sistem parlementer resmi berakhir dan digantikan oleh sistem presidensial yang sentralistik. Presiden kembali memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan. Inilah awal mula transisi menuju sistem Demokrasi Terpimpin. Meski pendek, masa demokrasi parlementer memberikan pengalaman penting dalam praktik demokrasi di Indonesia. Rakyat mulai belajar menggunakan hak politiknya secara langsung. Selain itu, pemilu 1955 menjadi warisan berharga yang menunjukkan kemampuan rakyat dalam berpartisipasi secara damai. Sistem ini juga membentuk dasar bagi pengembangan partai politik di masa depan. Namun, pelajaran penting dari masa ini adalah pentingnya stabilitas politik dan kedewasaan dalam berpolitik. Oleh karena itu, sistem demokrasi parlementer dinilai belum cocok dengan kondisi Indonesia saat itu. Ketidaksiapan lembaga politik, konflik ideologi, dan lemahnya ekonomi membuat sistem ini sulit bertahan. Meski demikian, masa ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah demokrasi Indonesia. Evaluasi terhadap periode ini menjadi dasar pertimbangan dalam memilih sistem politik di masa yang akan datang. Maka, pemahaman atas demokrasi parlementer harus dilihat sebagai proses pembelajaran bagi bangsa Indonesia.

### **Demokrasi Terpimpin (1959–1966)**

Setelah sistem parlementer dianggap gagal memberikan stabilitas, Presiden Soekarno mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Kembalinya UUD 1945 memberikan Soekarno kewenangan yang lebih luas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sejak saat itu, sistem Demokrasi Terpimpin mulai diterapkan. Sistem ini menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Dalam Demokrasi Terpimpin, parlemen tidak lagi berperan sebagai pengontrol pemerintah, melainkan hanya sebagai pelengkap. Presiden dapat menunjuk anggota lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk anggota parlemen dan menteri. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi dibatasi oleh mekanisme checks and balances. Sistem ini memberi ruang besar bagi dominasi individu dalam kekuasaan negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pemerintahan yang otoriter. Presiden Soekarno memperkuat sistem ini dengan ideologi Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ia mencoba mengakomodasi tiga kekuatan besar di masyarakat dalam satu sistem politik. Namun kenyataannya, kerja sama ketiganya sangat rapuh dan penuh konflik tersembunyi. Ketegangan antara kelompok agama dan komunis semakin meningkat. Persaingan ideologi ini justru membuat suasana politik semakin panas dan tidak kondusif.

Di masa Demokrasi Terpimpin, kebebasan pers dan berpendapat sangat dibatasi. Pemerintah mengontrol media dan membungkam suara oposisi. Organisasi-organisasi masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah dianggap sebagai pengganggu stabilitas. Banyak tokoh politik dan aktivis ditangkap tanpa proses hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Terpimpin cenderung menuju praktik otoritarianisme. Pemerintah juga mengabaikan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan. Partai hanya menjadi alat untuk mendukung kebijakan presiden, bukan wadah perjuangan rakyat. Bahkan, beberapa partai yang kritis dibubarkan oleh pemerintah. Lembaga-lembaga yang semestinya independen dikendalikan secara langsung oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini semakin mempersempit ruang demokrasi di Indonesia. Situasi ekonomi juga semakin memburuk pada masa ini. Inflasi mencapai angka yang sangat tinggi dan daya beli rakyat



terus menurun. Program-program pembangunan tidak berjalan efektif karena lebih banyak bersifat simbolik. Pemerintah lebih fokus pada propaganda politik ketimbang perbaikan ekonomi rakyat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit dan tidak sejahtera.

Puncak dari ketegangan politik dan ekonomi terjadi pada tahun 1965 dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara kelompok militer dan Partai Komunis Indonesia. Soekarno kehilangan dukungan politik yang kuat, terutama dari militer. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun menurun drastis. Keadaan ini membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru dalam politik nasional. Setelah peristiwa G30S/PKI, Jenderal Soeharto mulai mengambil alih kendali pemerintahan melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966. Surat ini memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan situasi negara. Perlahan namun pasti, kekuasaan Soekarno dilemahkan dan dialihkan kepada Soeharto. Masa Demokrasi Terpimpin pun berakhir seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Soekarno. Transisi ini menandai dimulainya era Orde Baru di Indonesia. Meskipun Demokrasi Terpimpin bertujuan menyatukan bangsa dalam satu visi, kenyataannya sistem ini justru memperlebar perpecahan. Konsentrasi kekuasaan di tangan presiden tidak diimbangi oleh kontrol institusional yang kuat. Rakyat kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara bebas dan terbuka. Sistem ini menciptakan stabilitas semu yang ditopang oleh kekuasaan represif. Oleh karena itu, Demokrasi Terpimpin dianggap gagal mewujudkan cita-cita demokrasi sejati. Pelajaran penting dari era ini adalah perlunya keseimbangan kekuasaan dan partisipasi rakyat dalam sistem politik. Demokrasi tidak bisa dijalankan hanya dengan satu suara dari pemimpin tanpa melibatkan elemen masyarakat lainnya. Kebebasan, transparansi, dan akuntabilitas harus dijaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Demokrasi Terpimpin menjadi catatan sejarah yang penuh kontroversi dalam perjalanan politik Indonesia. Evaluasi terhadap sistem ini penting agar kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa depan.

### **Orde Baru (1966–1998)**

Setelah berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia memasuki era baru yang dikenal dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Orde Baru berusaha mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi yang terguncang akibat konflik sebelumnya. Pemerintahan Soeharto berfokus pada pembangunan nasional dengan pendekatan yang terpusat dan militeristik. Sistem politik Orde Baru menekankan stabilitas sebagai syarat utama keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kebebasan politik dibatasi demi menjamin keamanan dan keteraturan. Dalam sistem Orde Baru, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan cenderung dominan atas lembaga lainnya. Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun dengan dukungan militer dan birokrasi yang kuat. Pemilihan umum tetap dilaksanakan, tetapi bersifat formalitas karena hanya ada tiga partai peserta: Golkar, PPP, dan PDI. Golkar yang didukung pemerintah selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu. Hal ini menciptakan sistem politik yang tidak kompetitif dan cenderung otoriter. Militer memiliki peran sentral dalam sistem politik Orde Baru melalui konsep dwifungsi ABRI. Konsep ini memberi militer peran tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam pemerintahan dan kehidupan sipil. Banyak posisi strategis dalam pemerintahan diisi oleh tokoh militer. Hal ini menandakan militerisasi dalam struktur politik dan birokrasi Indonesia. Rakyat tidak memiliki banyak ruang untuk mengkritik atau menentang kebijakan negara. Pemerintah Orde Baru juga melakukan kontrol ketat terhadap media massa dan organisasi masyarakat. Kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada penangkapan, pembredelan media,



atau pembatasan kegiatan organisasi. Undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat diterapkan secara ketat. Aktivis mahasiswa dan kelompok oposisi menjadi target represi aparat keamanan. Suasana ketakutan dan tekanan menjadi ciri khas kehidupan politik saat itu.

Meski demikian, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang cukup tinggi, terutama pada dekade 1980-an dan awal 1990-an. Pemerintah melaksanakan program pembangunan yang masif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan per kapita meningkat dan angka kemiskinan menurun secara signifikan. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Namun, pencapaian ini dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas. Salah satu ciri khas Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan dan keputusan politik di tangan elite pusat, terutama Presiden Soeharto. Pemerintah daerah tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mengambil keputusan strategis. Semua kebijakan ditentukan oleh pusat dan daerah hanya menjadi pelaksana. Sentralisasi ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Ketidakpuasan terhadap sistem ini perlahan menumpuk di berbagai wilayah. Menuju akhir kekuasaan Orde Baru, krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menjadi titik balik yang besar. Nilai tukar rupiah anjlok dan ekonomi nasional terpuruk. Inflasi tinggi, PHK massal terjadi, dan kemiskinan meningkat tajam. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Situasi ini memicu gelombang protes besar dari mahasiswa dan rakyat.

Puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, terutama Jakarta. Tuntutan utama adalah reformasi total dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Ketegangan meningkat saat terjadi kerusuhan dan kekerasan yang menewaskan banyak orang. Dalam tekanan yang terus meningkat, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Berakhir sudah era Orde Baru yang telah berkuasa selama tiga dekade. Meski memiliki sejumlah keberhasilan di bidang pembangunan, Orde Baru meninggalkan warisan buruk dalam hal kebebasan sipil dan supremasi hukum. Sistem politik yang otoriter tidak memberi ruang bagi demokrasi yang sehat. Partisipasi rakyat dibatasi dan suara kritis dianggap sebagai ancaman. KKN menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan dan lembaga negara. Oleh karena itu, jatuhnya Orde Baru menjadi momentum penting untuk memulai reformasi politik secara menyeluruh. Pelajaran dari Orde Baru menunjukkan bahwa stabilitas tanpa demokrasi tidak dapat bertahan lama. Keseimbangan antara pembangunan dan penghormatan terhadap hak rakyat harus dijaga. Sistem politik yang sehat memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Reformasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem politik Indonesia. Dengan demikian, masa Orde Baru menjadi babak penting dalam sejarah politik Indonesia yang perlu dievaluasi secara objektif.

### **Era Reformasi (1998–sekarang)**

Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang menandai babak baru dalam sejarah politik nasional. Era ini ditandai dengan tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi, transparansi, dan penegakan hukum. Pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie mulai melakukan perubahan besar terhadap struktur politik dan sistem pemerintahan. Salah satu langkah awal yang signifikan adalah pembebasan tahanan politik dan pencabutan pembatasan terhadap kebebasan pers. Masyarakat mulai merasakan angin segar demokrasi yang sebelumnya terkungkung. Reformasi membawa perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam struktur ketatanegaraan. Amandemen UUD 1945



dilakukan secara bertahap untuk memperkuat sistem demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden. Lembaga-lembaga negara mulai dibentuk dan dikuatkan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem pemilihan umum juga diubah menjadi lebih demokratis, dengan pemilihan langsung untuk presiden, gubernur, dan kepala daerah. Partisipasi rakyat dalam politik semakin terbuka dan luas.

Salah satu perubahan penting dalam era Reformasi adalah penghapusan dwifungsi ABRI. Militer tidak lagi memiliki peran politik aktif dan dikembalikan pada fungsinya sebagai alat pertahanan negara. TNI dan Polri dipisah sebagai institusi yang berbeda, untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Reformasi sektor keamanan ini bertujuan mencegah dominasi militer dalam urusan sipil. Hal ini menjadi salah satu simbol utama keberhasilan demokratisasi di Indonesia. Kebebasan pers juga mengalami kemajuan signifikan pasca-Reformasi. Banyak media baru bermunculan dan mampu menyuarakan kritik terhadap pemerintah tanpa takut diberangus. Undang-undang Pers disahkan untuk menjamin kebebasan pers dan hak masyarakat atas informasi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti tekanan dari pemilik modal dan ancaman kekerasan terhadap jurnalis. Namun secara umum, kebebasan berekspresi jauh lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Sistem multipartai kembali ditegakkan dengan memberikan kesempatan bagi banyak partai untuk ikut serta dalam pemilu. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam sistem perwakilan di parlemen. Persaingan antar partai menjadi lebih terbuka dan sehat, meskipun terkadang memicu fragmentasi politik. Pemilu pun diawasi oleh lembaga independen, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Ini bertujuan menjaga keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan demokrasi. Pemerintahan juga mendorong otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi politik. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah. Namun, desentralisasi ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti munculnya raja-raja kecil di daerah dan praktik korupsi lokal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pun harus diperkuat. Dalam bidang hukum dan HAM, reformasi mencoba memperbaiki sistem peradilan yang sebelumnya sarat dengan intervensi kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi. Banyak pejabat tinggi yang ditangkap karena kasus korupsi, menandakan upaya serius untuk membenahi birokrasi. Namun, KPK juga menghadapi tantangan berupa pelemahan kewenangan melalui revisi undang-undang. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan mundurnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Meski Reformasi membawa banyak kemajuan, masih terdapat berbagai persoalan dalam sistem politik Indonesia. Politik uang, kampanye hitam, dan politik identitas masih mewarnai setiap pemilu. Ketimpangan ekonomi dan sosial juga memengaruhi partisipasi politik rakyat. Praktik oligarki mulai muncul di mana kekuatan ekonomi memengaruhi kebijakan politik. Ini menunjukkan bahwa demokrasi masih dalam proses konsolidasi. Reformasi juga membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. LSM, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan advokasi. Demonstrasi dan unjuk rasa menjadi saluran sah untuk menekan kebijakan pemerintah. Namun, pemerintah tetap perlu menjamin bahwa kebebasan berpendapat tidak direspons dengan represi. Keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban harus dijaga agar demokrasi tetap sehat. Secara keseluruhan, sistem politik Indonesia pada era Reformasi mengalami perubahan signifikan menuju demokrasi yang



lebih terbuka dan partisipatif. Meski masih dihadapkan pada tantangan besar, fondasi demokrasi sudah mulai mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Masa depan sistem politik Indonesia bergantung pada konsistensi dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat pun harus terus kritis dan aktif mengawal jalannya pemerintahan.

## **KESIMPULAN**

Sistem politik Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa, dimulai dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia tidak memiliki kedaulatan politik dan hanya menjadi objek kekuasaan kolonial. Setelah kemerdekaan, sistem politik pun mulai dibangun dengan semangat demokrasi, meskipun masih belum stabil dan sering berubah. Masa awal kemerdekaan menjadi fondasi penting bagi pencarian bentuk sistem politik yang sesuai dengan karakter bangsa.

Masa Demokrasi Liberal menandai periode ketika sistem multipartai dan kebebasan politik diberlakukan, namun situasi yang terlalu bebas justru menimbulkan instabilitas politik. Sebaliknya, Demokrasi Terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno berusaha memusatkan kekuasaan demi kestabilan, namun justru menghasilkan pemerintahan otoriter. Kondisi ini berlanjut ke masa Orde Baru di bawah Soeharto, di mana stabilitas dan pembangunan ekonomi dijaga dengan cara membatasi kebebasan politik rakyat. Meskipun Orde Baru membawa pertumbuhan ekonomi, namun praktik korupsi dan represi politik merajalela.

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem politik Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Perubahan besar seperti amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, pemilu langsung, serta penguatan lembaga negara merupakan langkah maju dalam memperbaiki tatanan politik nasional. Kebebasan pers, otonomi daerah, dan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam masa ini. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi, seperti politik uang, korupsi, dan pengaruh oligarki dalam demokrasi.

Dengan demikian, sistem politik Indonesia merupakan cerminan dari perjalanan sejarah dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Setiap periode menghadirkan pelajaran penting yang seharusnya menjadi refleksi untuk membangun sistem yang lebih baik. Konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas sistem politik. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menegakkan keadilan, transparansi, dan kedaulatan rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aspinall, Edward. 2005. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Haryanto, Aji. 2019. "Reformasi Politik di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 23, no. 1, hlm. 45–59. <https://doi.org/10.22146/jsp.41325>
- Liddle, R. William. 1996. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Allen & Unwin.



- Mietzner, Marcus. 2014. "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society." *Democratization*, vol. 21, no. 2, hlm. 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.859416>
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Politik Hukum dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachman, Luthfi. 2018. "Transformasi Sistem Politik Indonesia Pasca-Reformasi." *Jurnal Politik Profetik*, vol. 6, no. 1, hlm. 12–25. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/050103>
- Rahmatullah, Asep. 2021. "Demokrasi di Indonesia: Dari Masa Orde Lama hingga Era Reformasi." *Jurnal Demokrasi dan Politik*, vol. 10, no. 2, hlm. 122–138. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/demokrasi/article/view/346>
- Santoso, Purwo. 2007. *Sistem Politik Indonesia: Menuju Konsolidasi Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Simanjuntak, Hotman. 2020. "Peran Media dalam Sistem Politik Era Reformasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Politik*, vol. 5, no. 2, hlm. 78–91. <https://jurnal.unpad.ac.id/kompol/article/view/29581>
- Wibowo, Dwi. 2014. *Orde Baru dan Warisan Otoritarianisme dalam Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.